

MENYIMAK KERANCUAN DALAM HUBUNGAN LINTAS KULTUR DAN STRUKTUR

Oleh: Raharjo*

Sebuah mobil berplat merah (dinas) dikemudikan oleh seorang sopir berseragam (dinas) memasuki sebuah tempat parkir di depan sebuah pasar. Seorang ibu, yang dilihat dari dandanannya diyakini bukan pejabat, keluar dari mobil dan bergegas masuk ke pasar. Dari jenis tas yang dibawanya, terlihat jelas bahwa ibu itu ke pasar bukan untuk menjalani suatu tugas resmi. Bagaimana reaksi orang-orang sekitarnya? Sama sekali tidak ada perhatian khusus. Dan hampir dapat diyakini pula bahwa instansi dan karyawan tempat mobil itu berasal juga tidak ada reaksi. Kejadian itu demikian lumrahnya sehingga tidak memancing perhatian atau reaksi khusus dari pihak-pihak tersebut

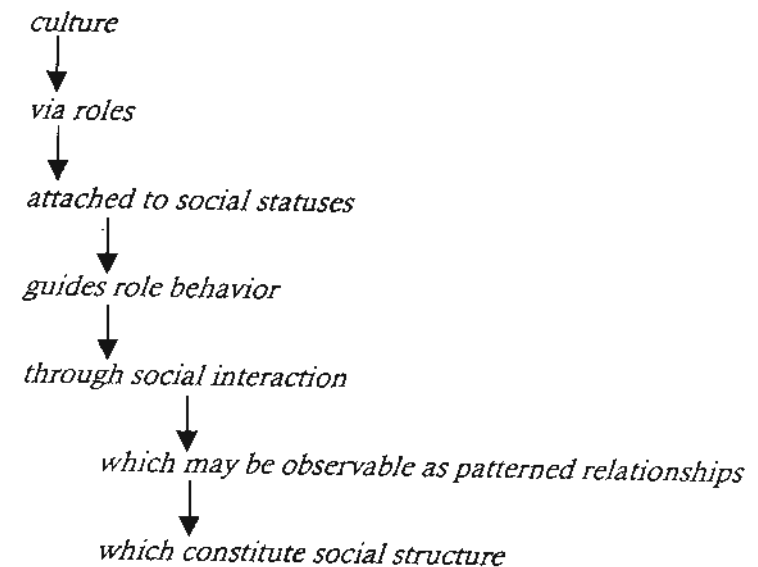
Tulisan ini diawali dengan meng-etalase-kan sebuah cerita yang terkesan *trivial* untuk diangkat ke dalam suatu wacana ilmiah. Salahkah perilaku ibu pengguna mobil dinas dalam cerita di atas? Apakah reaksi pihak-pihak sekitar yang sangat netral tersebut telah cukup untuk menunjukkan persepsi tentang adanya legitimasi sosial maupun legal terhadap perilaku tersebut?

Dalam kenyataan, kita pun mungkin tidak mepedulikan kejadian semacam itu. Atau paling-paling hanya melihatnya sebagai hal yang wajar-wajar saja. Namun, dalam konteks dan skenario kehidupan berbangsa dan bernegara, cerita sepele tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak gambaran peristiwa yang merefleksikan suatu *fenomena besar* yang selama ini merupakan akar permasalahan krusial yang melanda negeri ini. Melalui penelaahan beberapa perspektif sosiologi, tulisan ini hendak mengungkapkan sosok *fenomena besar* tersebut dalam kaitannya dengan permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

* Staf pengajar jurusan Sosiologi, Fisipol, Universitas Gadjah Mada.

Keterkaitan Kultur dan Struktur Sosial

Di dalam disiplin sosiologi, sejak awal dikembangkan pemahaman bahwa kultur dan struktur merupakan dua aspek fenomena yang saling berkait. Jon M. Shepard (1984) misalnya, menyatakan keterkaitan dan saling mempengaruhi yang tidak terelakkan antara kultur dan struktur. Secara ringkas Shepard menggambarannya dalam skema berikut ini.



Sebagai perbandingan, dapat dikemukakan di sini pendapat JBAF Mayor Polak dalam *Pengantar Sosiologi* (1966) yang disuntingnya. Polak menyatakan bahwa terdapat *korelasi fungsional* antara aspek kultur dan aspek struktur dari suatu masyarakat. Masing-masing aspek saling mendukung dan membenarkan. Perubahan pada aspek kultur akan segera diimbangi oleh perubahan struktur. Demikian pula sebaliknya.

Ada dua kerangka berpikir yang berpengaruh dominan dalam memahami keterkaitan antara kultur dan struktur. Kerangka berpikir *pertama* menekankan pada pengakuan atas perbedaan atau bahkan ketimpangan antara perubahan pada aspek kultur dan perubahan pada aspek struktur. Dalam suatu perubahan

bisa saja terjadi *cultural lag*, yakni tertinggalnya aspek kultural dari perkembangan aspek struktural. Sebaliknya, juga bisa terjadi *social lag*, yakni tertinggalnya aspek struktur dari perkembangan aspek kultur.

Kerangka berpikir *kedua* lebih menekankan keserasian atau keseimbangan antara perubahan di tingkat kultur dengan perubahan di tingkat struktur dalam masyarakat. Kerangka berpikir seperti ini masih memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam kerangka pemikiran sosiologi hingga saat ini, dan cenderung melahirkan perspektif konservatif. Argumentasi teoritisnya dibangun dari asumsi bahwa masyarakat selalu *well-organized* dan stabil. Penyimpangan terhadap tatanan sosial yang ada, apalagi dalam bentuk perubahan radikal atau pembaharuan, dipandang sebagai keadaan 'abnormal' atau insidental, yang nantinya akan menjadi normal kembali. Dalam sosiologi, dasar pemikiran ini sangat dipengaruhi oleh paham organisme biologis, khususnya mekanisme pengaturan diri yang disebut *homeostatis*. Masyarakat diasumsikan memiliki mekanisme pengaturan diri yang secara otomatis akan mengendalikan segala bentuk perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karenanya masyarakat diibaratkan sebagai suatu sistem yang tidak pernah berubah. Dalam konstelasi masyarakat seperti ini, perilaku sosial diyakini bisa diramalkan (*predictable*) dan sangat solid, sebagaimana fenomena fisik. Sebab, perilaku sosial pada hakekatnya merupakan produk dari proses sosialisasi yang berada dalam bingkai kultur dan struktur masyarakatnya.

Perspektif konservatif memiliki sejumlah gugatan validitas ketika dihadapkan kepada beberapa pertanyaan mendasar sebagai berikut: Bagaimana perspektif ini melakukan identifikasi suatu unit kelompok atas dasar pola kultural-struktural tertentu, padahal masyarakat selalu berada dalam keadaan berubah dan belum tentu dalam keseimbangan?; Bagaimana perspektif ini menjelaskan fenomena interaksi lintas kultural-struktural yang berlangsung seiring dengan tuntutan perkembangan pada era globalisasi? Bagaimana perspektif ini menjelaskan pengaruh perubahan serta perkembangan yang terkadang hanya bisa dijelaskan dalam konteks sejarah global dan bersifat mondial (seperti misalnya yang dilontarkan Fernand Braudel, dan diikuti oleh Immanuel Wallerstein)?

Tidak mudah untuk melakukan identifikasi suatu kelompok masyarakat yang menjadi determinan perilaku seseorang sebagaimana termaksud dalam perspektif konservatif, apalagi dalam konteks era globalisasi seperti sekarang

ini. Identifikasi terhadap suatu unit kelompok akan tergantung pada banyak faktor. Salah satunya adalah tingkat perkembangan masyarakat. Pada tingkat perkembangan masyarakat tertentu, suatu unit kelompok mungkin berkembang dalam bentuk komunitas-komunitas kecil yang bersahaja, seperti keluarga meluas (*extended family*), ketetanggaaan (*neighbourhood*), dan komunikasi desa. Atau dalam bentuk kelompok yang lebih besar tetapi masih bersifat bersahaja, seperti kelompok *tribal* (rumpun), kesatuan komunitas berbasis kesukuan atau rasial. Unit kelompok tersebut bisa juga dalam bentuk negara modern sepanjang negara tersebut bukan sekedar sebagai kesatuan politis (*political entity*).

Permasalahan yang dihadapi perspektif konservatif menjadi tampak menyolok ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa manusia kontemporer tidak hanya hidup dalam lingkup satu komunitas. Di samping menjadi bagian dari suatu *extended family* komunitas desa tertentu, komunitas *tribal* tertentu, atau komunitas kesukuan tertentu, mereka juga merupakan bagian dari warga masyarakat suatu negara. Mereka memiliki berbagai dimensi hubungan yang melintas di antara berbagai kelompok tersebut. Mereka melintasi pola struktur dan kultur yang berbeda-beda dalam satu kehidupan yang dialaminya. Di samping itu, perspektif konservatif masih direpotkan lagi untuk menjelaskan terlalu jauh dan langgengnya keadaan-keadaan 'abnormal' yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan global dan mondial saat ini.

Terlepas dari kelemahan-kelemahan di atas, perspektif konservatif memberikan sumbangan pemikiran yang cukup mendasar dan sangat berguna dalam memahami kaitan antara perilaku, kultur, dan struktur. Yakni bahwa *perilaku manusia adalah produk dari pola kultur dan struktur sosial kelompok masyarakat tertentu*. Sejauh mana determinasi serta dampaknya terhadap kompleks hubungan yang bersifat lintas kultural-struktural dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pusat (*Center*) dan Pinggiran (*Periphery*)

Dalil dari perspektif konservatif di atas barangkali akan mudah ditemukan dalam kenyataan sepanjang asumsi teoritisnya terbukti sah, yakni bahwa masyarakat selalu berada dalam keadaan sangat teratur (*well-organized*) dan stabil. Terlebih lagi bila satuan-satuan masyarakat yang ada di dunia semuanya

berskala kecil (*small-scale community*) dan terisolasi satu sama lain sehingga nampak sebagai komunitas yang mandiri. Dalam skenario semacam ini, jika seandainya ada, tentu tidak akan terjadi hubungan lintas kultural-struktural antar orang-orang dari berbagai kelompok komunitas. Hal ini akan mencegah hadirnya kerancuan perilaku di dalam antar-hubungan (*interraction*) mereka maupun kekhawatiran tentang salah penyesuaian (*mal adjustment*) di dalam antar-hubungan tersebut. Kehidupan manusia laksana kepompong dalam selongsongnya, terasa aman dan nyaman tanpa pengaruh dari kekuatan luar yang berpotensi merubah atau mengacaukan kehidupan tersebut.

Namun, kenyataan berbicara lain. Manusia adalah makhluk dinamis. Mereka selalu berubah, baik secara evolusioner maupun revolusioner. Proses perubahan tersebut di samping mengubah besaran unit komunitas dari skala kecil menjadi skala besar, juga menghadapkan anggota suatu komunitas kepada kelompok-kelompok lain di luar unit komunitasnya. Sebagai konsekuensinya, setiap anggota komunitas tidak hanya memiliki hubungan dengan orang lain dari komunitasnya sendiri, melainkan juga memiliki hubungan dengan orang lain di luar komunitasnya. Dengan lain perkataan, tiap orang mulai melakukan hubungan lintas kultural-struktural. Sebagai akibat sifat hubungan yang demikian itu, akan muncul standar ganda dalam mekanisme pengaturan perilaku. Sebuah perilaku tidak lagi bisa disebut sebagai produk seutuhnya dari komunitas tertentu, melainkan juga dipengaruhi oleh pola kultur dan struktur dari unit komunitas lain. Kondisi semacam ini membuka lebar-lebar kemungkinan terjadinya kerancuan perilaku orang dalam antar-hubungan mereka satu sama lain.

Kapan manusia mulai memasuki hubungan lintas kultural-struktural yang berpotensi sebagai akar persoalan munculnya kerancuan perilaku mereka? Dalam sejarah evolusi besar manusia, kehidupan sosial diawali oleh pengelompokan kecil-kecil dan terpisah (terisolasi) satu sama lain. Kelompok kecil ini adalah komunitas desa, yang kehadirannya berawal dari ditemukannya cocok tanam sekitar 10.000 tahun lalu. Karena eksistensi komunitas desa melekat pada pertanian, sedang pertanian setelah era *food gathering economics* tetap merupakan mata pencaharian utama manusia, maka komunitas desa dalam beraneka bentuk dan karakternya berpengaruh terhadap pola kehidupan manusia. Bahkan, pada perkembangan selanjutnya, setelah skala komunitas semakin membesar — yakni dengan munculnya kelompok kumpulan (*band*), rumpun (*tribal*) hingga suku — komunitas desa masih diperlakukan sebagai

basis kultur dan struktur dari komunitas yang telah membesar tersebut. Sampai dengan era *food gathering economics* ini, mekanisme pengaturan perilaku seseorang masih berbasis pada satu unit komunitas, dengan masyarakat desa sebagai referensi yang utama.

Ketika sejarah evolusi manusia mengalami dorongan perkembangan (*breakthrough*), yang ditandai dengan hadirnya fenomena negara, lembaran baru dalam sejarah evolusi kehidupan manusia mulai terbuka. Sebab, negara secara umum bukanlah wadah dari satu unit komunitas tunggal dengan satu pola kultur dan struktur, melainkan merupakan wadah dari kemajemukan komunitas. Dengan demikian, di dalam negara, orang-orang "dipaksa" untuk melakukan hubungan lintas kultural-struktural dari berbagai kelompok yang ada.

Dalam sosiologi, fenomena munculnya negara dapat dicermati dalam wacana tentang evolusi politik. Elman Service (dalam Sanderson, terjemahan 1995) misalnya, menggambarkan empat tahap utama evolusi politik, yakni kumpulan (*band*), suku (*tribe*), *chiefdom*, dan negara (*state*). Pada tahap kumpulan dan suku, mekanisme kepemimpinan belum didasarkan atas kekuasaan (*power*), melainkan didasarkan atas pengaruh (*influence*). Artinya, mekanisme pengaturan perilaku pada kedua tahap tersebut masih berbasis kultur dan struktur komunitas sipil, bukan berbasis kultur dan struktur komunitas negara. Hal ini mengindikasikan bahwa pola kultur dan struktur dari sebuah komunitas merupakan determinan perilaku seseorang. Bahkan pada tingkat *chiefdom*, sekalipun telah menggunakan kekuasaan sebagai mekanisme pengendalian warga negara, namun masih belum terlepas dari sistem kekerabatan dalam masyarakat.

Fenomena negara muncul tatkala komunitas mulai mengalami diferensiasi, khususnya stratifikasi sosial. Teori-teori tentang lahirnya negara, khususnya dari Karl Marx, menekankan stratifikasi (baca: kelas) sebagai variabel utama dalam pemikiran teoritiknya. Mekanisme pengendalian warga pada tingkat ini tidak lagi efektif dilakukan melalui pengaruh (*influence*), melainkan melalui kekuasaan (*power*). Hadirnya negara menjadikan perilaku seseorang tidak lagi berbasis pada komunitas tunggal. Mekanismenya sangat dipengaruhi oleh kemajemukan komunitas/kelompok yang terproyeksi melalui hubungan lintas kultural-struktural di dalam wilayah negara tersebut.

Wacana evolusi politik sebagaimana yang dikemukakan Elman Service memberi kesan bahwa lahirnya negara berlangsung dalam proses evolusi yang runtut dan unilinier, dari satu tingkatan atau tahap menuju tingkatan atau

tahap berikutnya. Proses evolusi unilinier semacam ini (sekalipun sebenarnya merupakan wacana umum dalam evolusi besar manusia) kurang tepat untuk menjelaskan terjadinya negara-negara di dunia ketiga. Proses terbentuknya negara di dunia ketiga tidak mengikuti proses evolusi seruntut yang digambarkan Elman Service. Negara-negara dunia ketiga di dalam dirinya terkandung komponen-komponen yang sangat heterogen dalam berbagai aspek, khususnya menyangkut tingkat perkembangannya. Indonesia, misalnya, memiliki komponen-komponen komunitas dari tingkat kumpulan, suku, *chiefdom*, hingga kelompok yang sangat terdiferensiasi.

Einstadt (1971) menjelaskan dobrakan-perkembangan dengan cara yang berbeda. Einstadt menggunakan istilah pusat (*center*) dan pinggiran (*periphery*) untuk menjelaskan terjadinya dobrakan-perkembangan dari masyarakat *pre-literate* menuju masyarakat *literate*. Masyarakat *pre-literate* dalam kerangka pemikiran Einstadt adalah masyarakat yang masih primitif, dan dikategorikan sebagai kelompok pinggiran. *Literacy*, bagi Einstadt, merupakan variabel yang melahirkan dobrakan-perkembangan, yakni dengan munculnya pusat-pusat (*centers*) ekonomi, politik, dan kebudayaan. Pusat-pusat ini mengembangkan simbolisasi tersendiri yang memisahkan diri dari simbol-simbol primordial pinggiran. Dalam pemahaman Einstadt, negara dapat diartikan sebagai organisasi dari keseluruhan pusat dan pinggiran yang ada dalam suatu wilayah. Dengan demikian, di dalam suatu negara terakomodasi semua komponen masyarakat, dari yang masih bersahaja sampai yang telah terdiferensiasikan.

Dengan meninjau kerangka pemikiran Einstadt dan sedikit modifikasi, tulisan ini akan mengeksplorasi tarik menarik antara negara dengan kelompok-kelompok komunitas yang ada didalamnya. Terminologi pusat-pinggiran tidak digunakan untuk merepresentasikan dikotomi *literate-preliterate*, melainkan menunjuk pada dikotomi antara negara sebagai pusat, dengan kelompok komunitas didalam negara sebagai pinggiran.

Pusat dan Pinggiran di Indonesia

Di manakah relevansi serangkaian paparan di atas dengan *fenomena besar* yang disinggung pada awal tulisan ini? *Fenomena besar* tersebut pada hakekatnya merupakan refleksi dari kompleksitas properti yang terkandung dalam hubungan pusat-pinggiran. Dengan sedikit mereduksi muatan kompleksitas tersebut, bisa dipaparkan satu proposisi sebagai berikut: *jauh-*

dekatnya perbedaan pusat dengan pinggiran merupakan akar masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semakin besar tingkat perbedaan tersebut, akan semakin besar pula potensi yang terkandung bagi munculnya berbagai persoalan. Demikian pula sebaliknya.

Negara-negara modern Barat umumnya dipahami kurang/tidak memiliki masalah dalam hubungan pusat-pinggiran dibandingkan dengan negara-negara dunia ketiga saat ini. Kecilnya perbedaan pusat-pinggiran di negara-negara Barat tersebut sebenarnya bukan merupakan keadaan *inherent* masyarakatnya, tetapi sebagai produk dari proses sejarah yang panjang. Sebelum berkembang menjadi negara-negara modern, negara-negara di benua Eropa telah mengalami proses penyesuaian (*adjustment*) yang lama sekali antara pusat dengan pinggiran. Proses penyesuaian ini di samping berlangsung melalui proses evolusioner dan unilinier, juga berlangsung melalui berbagai bentuk revolusi, seperti revolusi politik, revolusi teknologi, dan revolusi sosial-budaya.

David Riesman (dalam David McClelland, 1955) mencoba mencari hubungan antara revolusi-revolusi yang terjadi di Eropa dengan perubahan watak sosial (*social character*) masyarakat Eropa. Riesman memilah dua gelombang revolusi di Eropa, yang dihitung sejak abad pertengahan. Gelombang revolusi yang pertama terdiri atas *Renaissance*, Reformasi, Reformasi Balasan, Revolusi Industri, dan revolusi-revolusi politik yang terjadi pada abad 17, 18, dan 19. Gelombang revolusi yang pertama ini, menurut Riesman, menyebabkan lenyapnya cara hidup tradisional yang berorientasi pada keluarga dan klan. Gelombang revolusi yang kedua menyangkut semua perkembangan sosial secara terpadu, yang ditandai oleh pergeseran dari abad produksi menuju abad konsumsi.

Dalam berbagai pembahasan tentang sejarah perkembangan masyarakat Eropa, Revolusi Perancis (1789) dan Revolusi Industri umumnya dipandang sangat monumental. Revolusi Perancis, di samping merupakan "kisah besar" runtuhnya monarki absolut, juga menjadi tonggak sejarah runtuhnya kultur dan struktur masyarakat feodal, sekaligus menandai tahap awal munculnya proses borjuasi yang mengikuti perkembangan kapitalisme perdagangan modern. Sementara Revolusi Industri menandai perkembangan kapitalisme industri modern, yang kemudian mengantarkan masyarakat Eropa menjadi masyarakat industrial modern.

Dua revolusi besar tersebut, dan proses evolusi yang menyertainya, telah mendekatkan atau mengeliminasi perbedaan pusat dan pinggiran dalam masyarakat Eropa hingga menjelang munculnya negara modern. Sebagai akibatnya, kemunculan negara-negara modern di Eropa tidak lagi terbebani oleh persoalan dualisme pusat-pinggiran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tiadanya kesenjangan pusat-pinggiran ini memiliki dampak positif terhadap hubungan lintas kultural-struktural antar warga masyarakat. Artinya, hubungan lintas kultural tidak lagi menjadi akar permasalahan yang krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (lihat Peter L. Berger, terjemahan, 1990).

Bagaimana dengan Indonesia dan negara-negara dunia ketiga umumnya?

Negara-negara dunia ketiga umumnya memiliki sejarah perkembangan yang berbeda dengan dunia Barat. Beberapa bagian dari perkembangan tersebut memang menyerupai dunia Barat, dan hal ini bisa dijelaskan dengan perspektif evolusioner. Namun, bagian terbesar lainnya memiliki dialektika sejarah sendiri, yang sama sekali berbeda dengan dunia Barat. Di samping itu, beragam revolusi yang menyertai sejarah negara-negara dunia ketiga memiliki *magnitude* dan karakteristik yang sama sekali berlainan dengan yang terjadi di dunia Barat. Revolusi-revolusi tersebut tidak memiliki eskalasi dan intensitas yang cukup potensial untuk mendekatkan atau mengintegrasikan pusat dan pinggiran. Sebagai akibatnya, sejarah perkembangan negara-negara dunia ketiga senantiasa mewariskan kesenjangan pusat-pinggiran.

Sejarah perkembangan Indonesia tidak terlepas dari warisan kesenjangan pusat-pinggiran tersebut. Namun, berbeda dengan negara-negara dunia ketiga lainnya, Indonesia memiliki properti yang potensial untuk terjadinya kesenjangan pusat dan pinggiran. Properti potensial tersebut bertitik tolak dari lanskap Indonesia sebagai negara kepulauan, dengan 13.667 pulau, berada di iklim tropis, serta kawasan hutan tropis yang cukup luas. Kondisi fisik-geografis tersebut berpotensi untuk menciptakan isolasi-isolasi fisik. Kondisi fisik-geografis ini ikut menyumbang terciptanya isolasi kultural-struktural di antara warga masyarakatnya. Hal ini terbukti dari beragamnya adat-istiadat, tradisi, hukum adat, atau pola kebudayaan yang melekat pada eksistensi berbagai suku bangsa di Indonesia. Kalkulasi van Vollenhoven tentang 13 *adatrechtskringen* yang ada di Indonesia menguatkan bukti keberagaman adat-istiadat di Indonesia, meskipun jumlah yang sebenarnya masih jauh lebih

banyak daripada hitungan van Vollenhoven tersebut (sebagai pertimbangan, lihat catatan etnografi dari Kontjaraningrat). Ini pun belum mencakup beragamnya kepercayaan-kepercayaan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap cara hidup bangsa Indonesia. Di samping itu, keberagaman yang ada di Indonesia bersangkutan pula dengan tingkat kemajuan dari masing-masing daerah dan kelompok masyarakat di Indonesia. Dilihat dari tingkat kemajuannya, misalnya, Indonesia mungkin bisa digambarkan dari dua kawasan, kawasan Barat dan kawasan Timur. Namun, dari masing-masing kawasan tersebut, terdapat banyak varian perkembangan yang bisa dikemukakan. Bahkan, di pulau Jawa sekalipun yang dinilai sebagai *melting-pot*, masih terdapat daerah-daerah yang “tradisional-terbelakang”.

Sejumlah pakar melihat potensi kesenjangan ini sebagai “material bangunan” yang berharga dalam bangunan teori-teori atau pendapat-pendapat mereka. E. A. Shils (1961) misalnya, menyatakan bahwa masalah utama yang dihadapi negara-negara yang baru merdeka adalah terdapatnya jurang perbedaan antara golongan berpendidikan yang jumlahnya sangat kecil berhadapan dengan sekelompok besar masyarakat yang tidak berpendidikan (*uneducated mass*). Pendapat Shils ini di samping menunjuk pada kesenjangan kelompok dalam kategori pendidikan, juga menunjuk pada kesenjangan antara kelompok tradisional *vis a vis* kelompok modern.

Berkenaan dengan persoalan kesenjangan tersebut, Boeke (1948) secara tegas menyebutnya sebagai *dualisme*, yaitu eksistensi dua sistem yang kontradiktif, sistem kapitalisme modern dan sistem pra-kapitalistik. Walaupun dualisme tersebut dimaknai Boeke dalam terminologi ekonomi, namun pendapatnya sering menjadi acuan bagi sejumlah pakar dalam menggambarkan adanya dualisme sosio-kultural. Dalam perkembangan berikutnya, pandangan tentang dualisme ini mewujudkan pada berbagai model dualisme, seperti dualisme regional (desa vs kota), dualisme sektoral (formal vs informal), dualisme finansial (bank vs rentenir), dan sebagainya.

Dalam kaitan ini, konsep primordialisme yang dikemukakan oleh Clifford Geerts memberi sumbangan yang cukup berharga, yang esensinya berkaitan erat dengan jurang perbedaan antara pusat dengan pinggiran. Primordialisme yang menggambarakan keterikatan orang pada daerah, suku, *tribal*, kepercayaan daerah, sering diktengahkan untuk menunjukkan perilaku seseorang yang kurang dapat memainkan peran-peran nasional. Peran nasional tersebut

semestinya dilakukan dengan berpijak pada kultur nasional, namun justru dilakukan melalui perilaku primordial.

Apakah kesenjangan pusat-pinggiran tersebut masih relevan dengan keadaan yang berkembang saat ini, khususnya berkenaan dengan proses transparansi yang menyertai arus globalisasi? Derajat relevansi atas masalah tersebut dapat dikemukakan dalam bentuk pertanyaan lain sebagai berikut: Apakah kita saat ini telah terbebas dari berbagai bentuk kesenjangan, khususnya kesenjangan ekonomi dan sosial? Apakah saat ini gejala primordialisme telah lenyap dari kehidupan kita? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dengan sendirinya membuktikan relevan atau tidaknya kesenjangan pusat-pinggiran sebagai akar permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Diakui oleh berbagai pihak bahwa saat ini telah terjadi banyak perubahan dalam perimbangan antara pusat dan pinggiran. Secara khusus hal ini tampak menyolok pada bidang pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan modern telah mampu mentransformasikan kualitas manusia Indonesia menjadi generasi berpendidikan modern, dengan kualifikasi modernitas tertentu yang mungkin dapat disamakan dengan kriteria manusia modern, misalnya, ala Alex Inkeles atau McClelland. Perubahan di bidang pendidikan ini tidak dapat dipungkiri ikut menyumbang semakin lunturnya perbedaan kualitas antara pusat dan pinggiran.

Namun, dengan melihat persoalan kesenjangan di bidang ekonomi, sosial, dan kultural, dapat ditegaskan bahwa persoalan yang diakibatkan oleh kesenjangan pusat-pinggiran masih tetap eksis. Berkenaan dengan hal tersebut, pada bagian berikutnya akan dipaparkan ilustrasi-ilustrasi empirik tentang dampak yang timbul dari kesenjangan pusat-pinggiran, baik pada masa lalu maupun pada sekarang ini.

Ilustrasi: Priyayiisme dan Distorsi Peran

Ilustrasi ini mengambil titik tolak pada fenomena *priyayiisme*, yakni sikap hidup feodalistik, sikap hidup tidak merakyat, orientasinya elitis, dan cenderung mementingkan hubungan vertikal dan hirarkis (*homo hierarchicus*). Gejala *priyayiisme* berawal dari politik etik yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Pada masa kolonial ini, kaum pribumi merupakan golongan

masyarakat umum yang memiliki kedudukan sosial-ekonomi sangat rendah. Berbeda dengan kaum pribumi, para kerabat kraton dan kaum bangsawan diakui memiliki kedudukan sosial yang tinggi, sehingga seolah terlepas dari atribut pribumi. Kraton dengan demikian menjadi simbol dari lapis atas masyarakat yang *legitimate*.

Priyayiisme muncul sebagai fenomena sosial ketika kaum pribumi (*inlander*) mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan modern. Pribumi berpendidikan ini sebagian dimanfaatkan Belanda sebagai pegawai pemerintah kolonial, termasuk sebagai pegawai *onderneming*. Sebutan "priyayi BB" (*Binnelands Bestuur*), yakni para pegawai/pejabat Pamong Praja, sangat terkenal pada waktu itu. Kaum pribumi yang berpendidikan, berkedudukan struktural dan bergaji tinggi tersebut merasa memerlukan citra baru yang berbeda dengan kaum pribumi umumnya. Salah satu caranya, sesuai dengan tuntutan jaman itu, adalah mengidentifikasi diri dengan simbol status yang sah, yakni dengan memiliki "keterkaitan dan kedekatan" dengan pihak kraton atau memiliki gelar kebangsawanan. Oleh karena kebangsawanan merupakan gelar yang diperoleh melalui keturunan (*ascribed status*), banyak pegawai pribumi yang kawin dengan pasangan dari golongan bangsawan. Tanpa perkawinan semacam itu, proses identifikasi diri juga dimungkinkan, karena kaum pribumi terdidik pada waktu itu telah memiliki kesetaraan status dengan kebangsawanan. Seiring dengan semakin meluasnya kaum pribumi yang memperoleh pendidikan modern, semakin banyak bermunculan "bangsawan-bangsawan tidak berdarah biru". Di Jawa, mereka disebut sebagai priyayi. Sekalipun dilihat dari pendidikannya mereka adalah intelektual-modernis, namun jiwa dan gaya hidup mereka adalah feodalistik.

Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, semenjak munculnya fenomena priyayi-baru, terlihat kecenderungan masyarakat lapis bawah (*wong cilik*) untuk menyekolahkan anaknya agar menjadi priyayi atau priyagung. Pendidikan, bagi mereka, digunakan sekedar sebagai tangga untuk dapat menjadi bangsawan. Dengan orientasi yang sangat feodalistik ini, beberapa pihak menyebut gejala ini sebagai neo-feodalisme.

Orientasi feodalistik tersebut memberi dampak negatif tatkala priyayi-baru tersebut memasuki berbagai lembaga kenegaraan (pusat), yakni adanya distorsi perilaku peran. Mereka menduduki jabatan struktural modern yang diperankannya dalam kultur tradisional. Mereka sulit diharapkan menjadi abdi masyarakat, karena mereka merasa sebagai bangsawan, yang semestinya

harus dilayani. Mereka lebih mengembangkan hubungan vertikal yang tajam dalam kelembagaan negara, sebuah perilaku yang menggambarkan karakter asli sistem feodal (akar otoritarianisme bisa dilacak dari fenomena ini). Mereka cenderung menganggap masyarakat/rakyat sebagai golongan yang terbelakang dan tradisional, oleh karenanya harus diperlakukan sesuai dengan kualifikasinya itu. Mereka mentabukan kritik dan kontrol dari bawahan, karena sistem feodalistik melembagakan hubungan vertikal dan hirarkis (yang tajam) dengan bawahan.

Fenomena semacam ini memang cukup dominan di Jawa, dan karena itu sejumlah pakar berpendapat bahwa pusat (pemerintahan) dalam berbagai aspeknya sangat diwarnai unsur-unsur Jawa. Namun dalam berbagai skala yang berbeda sebenarnya juga terdapat di luar Jawa. MA Jaspas dalam *Social Stratification and Social Mobility in Indonesia* (1961), melukiskan gejala priyayiisme ini juga muncul di Kutai, Boa, Bone, Luwuk-Langgai, Balai, Belu, Bima, dan Roti. Secara ilustratif gejala tersebut digambarkan lewat profil seorang pemuda dari lapis bawah, yang karena gelar kesarjanaannya, dapat mempersunting seorang gadis dari kalangan bangsawan.

Contoh-contoh tentang distorsi perilaku dan peran dari kelompok pinggiran masih bisa direntangkan hingga keadaan saat ini. Birokrasi kita yang sering dituding investor asing sebagai prasarana yang tidak efektif, tidak luput dari kontribusi pinggiran tersebut. Birokrasi yang dalam tradisi Weberian merupakan sistem yang menerapkan prinsip rasionalitas, dan karenanya sarat dengan sifat-sifat impersonal, dalam kenyataannya tidak terefleksi dalam lembaga-lembaga pusat. Pola-pola kultural dalam ujud sistem kekerabatan, klan, suku, daerah, atau ikatan-ikatan primordial lainnya telah menjadi *cultural block* bagi eksisnya sistem birokrasi Weberian tersebut. Di samping itu, situasi *permissive* yang dimungkinkan oleh penetrasi primordialisme pinggiran tersebut telah membuka akses bagi eksisnya perilaku-perilaku deviatif. Tidaklah terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa gejala KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) adalah fungsi dari kuat-lemahnya situasi *permissive* yang timbul dari penetrasi primordialisme pinggiran tersebut. Betapa kuatnya "warna" yang ditorehkan oleh pinggiran terhadap pusat dapat dilukiskan melalui komentar warga asing kepada penulis pada awal tahun 1980-an, bahwa birokrasi di Yogyakarta adalah "birokrasi Mataraman". Pendapat itu dikemukakan dengan maksud untuk menggambarkan kuatnya pengaruh budaya kraton terhadap sistem birokrasi di Yogyakarta.

Pada kondisi saat ini, setelah terjadi perkembangan sosial yang cukup kompleks, perbedaan pusat dan pinggiran tidak lagi identik dengan dikotomi tradisional-modern seperti semula. Ini tidak berarti bahwa hubungan antara pusat dan pinggiran telah berjalan secara sinkron. Intervensi dan penetrasi primordialisme pinggiran terhadap pusat masih tetap berlangsung. Namun, hal tersebut bukan dikarenakan oleh kuatnya peranan yang dimainkan primordialisme dan kemampuan pinggiran dalam pola kultur dan struktur pusat, melainkan karena dalam primordialisme terdapat "residu" (meminjam istilah Pareto untuk menunjuk "maksud tertentu di balik suatu alasan/ *deriva*t), yakni kepentingan. Dengan demikian terdapat kesenjangan untuk melakukan intervensi primordialisme ke dalam dimensi hubungan pusat untuk mencapai dan mempertahankan kepentingan yang bersangkutan, baik kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok.

Penutup

Sebagaimana ditunjukkan dalam tulisan ini, kerancuan perilaku yang timbul dalam hubungan lintas kultur dan struktur pada dasarnya berakar pada persoalan kesenjangan di dalam hubungan antara pusat dan pinggiran. Apapun pilihan kebijaksanaan eliminasi kesenjangan yang diambil, perlu secara hati-hati memperhitungkan faktor-faktor yang potensial menjadi sumber konflik, seperti primordialisme, keterbelakangan pinggiran, dan feodalisme. Di samping itu, implementasi kebijaksanaan tersebut perlu ditempuh melalui langkah-langkah akomodasi di antara berbagai kepentingan yang saling berbenturan dan saling berusaha mendominasi. Langkah hati-hati tersebut menjadi tantangan bagi negara-negara dunia ketiga, yang sebagian besar mewarisi sifat eksploitatif dalam hubungan pusat-pinggiran semasa kolonialisme. Kecerobohan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut bisa jadi justru mengakibatkan munculnya kolonialisme baru dalam bentuk kolonialisme internal, sebagaimana banyak digambarkan oleh pendekatan Neo-Marxist.

Kemauan pemerintah (*political will*) untuk melakukan eliminasi kesenjangan dalam hubungan pusat-pinggiran tidak berarti bahwa pusat harus lemah atau dilemahkan. Yang dituntut adalah semakin hilangnya (secara gradual) unsur eksploitatif dalam hubungan tersebut. Dalam konteks ini, kuatnya pusat tidaklah identik dengan kuatnya *state society* yang meminggirkan

civil society. Jika kita analogikan dengan dunia sepakbola, kuatnya pusat barangkali dapat diibaratkan sebagai tim-tim Eropa dan Amerika Selatan yang handal. Kompetisi di antara para pemain sepakbola sangat transparan, namun tidak mudah untuk dimasuki. Hanya orang yang berkualitas *prima* dan profesional yang bisa memasuki tim tersebut, tanpa memandang latar belakang suku, ras, agama yang dianutnya. Kuatnya pusat dalam analogi yang demikian ini cukup kondusif untuk menciptakan mekanisme yang mampu membendung intervensi primordialisme pinggiran. Dalam sosiologi, kita bisa meminjam *patterned variables* Talcot Parson untuk menggambarkan kategori lembaga-lembaga di tingkat pusat tersebut, yang kira-kira dapat dirumuskan sebagai berikut: (a) bersifat universalistik, berkualifikasi objektif untuk memasuki lembaga tersebut; (b) berorientasi pada kolektivitas, tidak berorientasi pada diri sendiri, dan kelompok yang dimaksud bersifat holistik, bukan sub-kelompok; (c) tidak afektif, dalam arti tidak terikat pada hubungan emosional sebagaimana yang banyak ditemukan hubungan primer dan primordial; (d) berorientasi prestasi, bukan bersifat pewarisan, kronisme atau nepotisme; (e) menekankan spesifitas, dalam arti menghindarkan diri dari kekaburan (*diffuseness*) peran, mislanya dalam perangkapan fungsi dan peran, atau salah fungsi atau peran (*wrong man in the wrong place*).

Daftar Pustaka

- Berger, Peter L., *Revolusi Kapitalis*, terjemahan, Jakarta: LP3ES, 1990.
 Coser, Lewis A., *Masters of Sociological Thought, Ideas in Historical and Social Context*, New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1971.
 Boeke, J.H., *The Interest of the Voiceless Far East, Introduction to Oriental Economics*, Leiden: Universitaire Pers, 1948.
 Einstadt, S.N., *Political Sociology*, New York: Basic Book Inc., 1971.
 Geerts, Clifford, *Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, terjemahan, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1983.
 Jaspas, M.A., *Social Stratification and Social Mobility in Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 1961.

- McClelland, David C., *The Achieving Society*, New York: Free Press, 1961.
 Pareto, Vilfredo, dalam Lewis A. Coser, *Masters of Sociological Thought, Ideas in Historical and Social Context*, New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1971.
 Polak, J.B.A.F. Major, *Sosiologi, Suatu Pengantar Ringkas*, cetakan V, Jakarta: Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, 1966
 Sanderson, Stephen K., *Sosiologi Makro, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, terjemahan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
 Service, Elman, dalam Stephen K Sanderson, *Sosiologi Makro, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, terjemahan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
 Shepard, Jon M., *Sociology*, second edition, New York: West Publishing Company, 1984.
 Shills, Edwards A., *The Calling of Sociology*, New York: Free Press, 1961.